

BAB I PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan disebut juga sebagai pangkal munculnya berbagai masalah sosial. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi seperti saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita suatu negara.

Kemiskinan merupakan isu strategis di sebuah negara, dimana kemiskinan seringkali menjadi hambatan bagi negara-negara yang sedang berkembang dalam proses pembangunan, seperti Indonesia. Todaro (2003) menyatakan bahwa pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensi. Seperti yang dikatakan Wrihatnolo (2002) bahwa multidimensi sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan dari berbagai faktor seperti aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga membawa dampak negatif yang besar terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi daerah berkembang, bahkan daerah-daerah maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar

daerah berkembang seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan beragam, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut secara optimal dapat memberi nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Timur (NTT)
Tahun 2017-2021

No	Nama Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota (Ribuan Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sumba Barat	36,69	36,30	36,56	36,95	37,78
2.	Sumba Timur	78,18	76,80	77,39	77,30	78,33
3.	Kupang	84,35	88,67	92,02	94,94	91,25
4.	Timor Tengah Selatan	136,45	130,63	130,31	128,98	125,68
5.	Timor Tengah Utara	58,59	56,09	56,94	56,98	58,33
6.	Belu	33,95	33,91	34,08	34,18	35,41
7.	Alor	43,90	44,13	44,32	43,55	43,83
8.	Lembata	36,26	36,95	37,46	37,92	38,75
9.	Flores Timur	26,97	27,99	27,83	27,89	28,90
10.	Sika	45,01	44,02	43,32	42,18	43,09
11.	Ende	65,11	66,01	63,45	65,22	66,38
12.	Ngada	20,21	20,79	20,31	20,62	20,98
13.	Manggarai	71,86	69,32	69,33	69,52	71,03
14.	Rote Ndao	45,57	46,12	47,66	48,77	51,71
15.	Manggarai Barat	49,39	48,53	49,23	49,40	51,15
16.	Sumba Tengah	25,37	24,93	25,12	25,37	25,48
17.	Sumba Barat Daya	99,55	97,28	96,30	97,81	100,42
18.	Nagekeo	19,20	18,69	18,70	18,51	19,11
19.	Manggarai Timur	74,85	74,88	75,83	76,69	77,17
20.	Sabu Raijua	28,22	28,88	29,49	30,14	30,60
21.	Malaka	30,91	30,79	30,83	31,12	32,17
22.	Kota Kupang	40,22	40,44	39,86	39,72	41,77
	Nusa Tenggara Timur	1150,79	1142,17	1146,32	1153,76	1169,31

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2022

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2021 sebesar 1169,3 ribu penduduk, turun 4,22 ribu penduduk (0,36%) dari September 2020. Kendati demikian, jumlah kemiskinan di NTT tersebut naik 15,55 ribu penduduk (1,38%) dibandingkan Maret 2020. Selama periode Maret 2017 – 2021, jumlah penduduk miskin tertinggi di NTT terjadi pada periode September 2020, yaitu mencapai 1173,5 ribu penduduk. Sementara jumlah yang terendah pada September 2019, yaitu 1129,5 ribu penduduk.

Dengan ini kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar bisah memecahkan masalah di ranah publik. Untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan (rencana) program, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Itulah sebabnya implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dalam waktu tertentu.

Secara umum di Kabupaten Ngada menjadi objek dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Pada Tahun 2019 Kabupaten Ngada sudah keluar dari zona kemiskinan, tetapi masih ada keluarga-keluarga yang memerlukan suntikan pemberdayaan. Berikut Jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngada dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.2
Data Penduduk Miskin di Kabupaten Ngada
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Prsentase
1.	2018	333.266	12,94%
2.	2019	161.196	12,48%
3.	2020	165.254	12,51%

Sumber : BPS Kabupaten Ngada 2022

Secara khusus di Kecamatan Wolomeze juga menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Ngada. Hal ini dilihat dari data jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Wolomeze.

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Wolomeze
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Prsentase
1.	2018	6.516	3.450	189%
2.	2019	5.328	2.150	248%
3.	2020	6.590	3.750	176%

Sumber : Kecamatan Wolomeze Tahun 2022

Masyarakat Desa Wue juga sangat merasakan kemiskinan, banyak masyarakat yang mengalami dampak negatif seperti ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dilihat dari tabel 1.4 tentang jumlah penduduk dan kemiskinan.

Tabel 1.4
Data jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Desa Wue
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Prsentase
1	2018	812	345	44%
2	2019	718	250	35%
3	2020	835	220	26%

Sumber: Desa Wue tahun 2022

Pada tahun 2019 jumlah keluarga miskin menurun dan pada tahun 2020 tingkat kemiskinana meningkat di Desa Wue. Dengan melihat pada tingkat kesejahteraan di Desa Wue yang masih sangat rendah maka itu merupakan salah satu indikator dalam penentuan penerima PKH.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini ditujukan kepada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan hak dasar.

Dana PKH disalurkan secara non tunai ke rekening masyarakat penerima PKH yang diakses dengan kartu debit “Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)”. Selama satu tahun anggaran dana PKH disalurkan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua pada bulan April, tahap ketiga pada bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober. Penetapan tersebut berdasarkan hasil verifikasi atau pemutakhiran data keluarga penerima manfaat selama periode tiga bulan oleh pendamping sosial PKH. Berikut tabel nilai manfaat tahunan dan jumlah penerimaan bantuan PKH menurut komponen yaitu :

Tabel 1.5
Anggaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wue
Tahun 2019-2020

No	Komponen Bantuan	Besar Bantuan per Tahun (Rp)	
		2019	2020
1.	Bantuan ibu hamil/menyusui	3.000.000	3.000.000
2.	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	3.000.000	3.000.000
3.	Bantuan peserta pendidikan SD/ sederajat	900.000	900.000
4.	Bantuan peserta pendidikan SMP/ sederajat	1.500.000	1.500.000
5.	Bantuan peserta pendidikan SMA/ sederajat	2.000.000	2.000.000
6.	Bantuan penyandang disabilitas berat	2.400.000	2.400.000

7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	2.400.000	2.400.000
---	-------------------------------------	-----------	-----------

Sumber : Pedoman Umum PKH 2022

Tabel 1.6
Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wue
Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kepala Keluarga (KK)
2019	250	33
2020	200	32

Sumber : Data PKH Desa Wue 2022

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa peserta PKH di Desa Wue pada tahun 2019 sebanyak 33 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penerima PKH di Desa Wue mengalami peningkatan sebesar 32 jiwa.

Proses penyaluran dana PKH di Desa Wue sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dimana dana PKH disalurkan secara bertahap sebanyak empat tahap dalam satu tahun anggaran. Sebelum pencairan dana dalam setiap tahap biasanya keluarga penerima manfaat PKH bersama pendamping melaksanakan rapat terlebih dahulu. Dalam rapat tersebut pendamping PKH memberikan informasi mengenai pencairan dana dan pemanfaatan dana PKH.

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Gambaran Program Keluarga Harapan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze?
2. Bagaimana implementasi program keluarga harapan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Harapan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze.
2. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat yang diperoleh dengan diadakannya penelitian ini :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk Penulis

Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang telah diterapkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari beberapa penelitian tersebut dan hasil pengamatan di lapangan.

2. Lingkungan Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur bagi pihak akademis maupun pihak-pihak lainnya khususnya mahasiswa/i fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dan kepada masyarakat Desa Wue, khususnya tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat.